

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2018. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Adhi Sulistiyono Nomor 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Pranadamedia Group
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Pranadamedia Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2013 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2010 *Mode-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Khelda Ayunita. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Sufiarina dan Yusrizal. 2015. *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Yurnal. 2012. *Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati ke Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Hikmah Mandiri
- Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

### **C. Artikel/Jurnal/Makalah**

Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal. 2014. *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.

Syofyan Hadi. 2017. *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*. Jurnal Ilmu Hukum.

Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, 1997. Jurnal Hukum.

Yusrizal, Sulaiman dan Mukhlis. 2011. *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Ilmu Hukum.

Bitu Gadsia Spaltani. 2018. *Pengadilan Khusus, Sebuah Perbandingan di Berbagai Negara dalam Penegakan Hukum*. Disertasi. Surakarta, Indonesia : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Qurratul Aini, Ana Khosiah dan Sri Lumatus Sa'adah. 2016. *Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.

